PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

RAHMAN DANI
NIM. B1011181088

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rahman Dani
N I M	:	B1011181088
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal	:	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 10 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Rahman Dani
NIM. B1011181088

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	Rahman Dani
NIM	B1011181088
Jurusan	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	Ekonomi Pembangunan

Judul Tugas Akhir (TA) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana ALokasi Khusus dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak,30 Juni 2025



Rahman Dani

NIM.B1011181088

LEMBAR YURIDIS

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Rahman Dani
NIM. B1011181088

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 30 Juni 2025

Majelis Penguji

No	Majelis Penguji	Nama/ NIP	Tgl/ Bln/ Thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing	Muz'an Sulaiman., S.E., M.M. NIP. 196108241987031003.	23/09/2025	
2	Ketua Penguji	Dr. Meiran Panggabean., S.E., M.Si. NIP. 196205251987031002.	23/09/2025	
3	Anggota Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M. E. NIP. 198610022019031004.	19/09/2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 24 SEP 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197206071998032001.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat"** yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko., S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Barkah., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Hj. Nurul Bariyah., S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Metasari Kartika., S.E., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Yanto., S.E., M.Sc., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Muz'an Sulaiman., S.E., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
7. Dr. Meiran Panggabean., S.E., M.Si., sebagai Dosen Penguji (Ketua Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.

8. Supriaman., S.Pd., M.Si., sebagai Dosen Penguji (Anggota Penguji) yang telah memberikan arahan, nasehat di dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Kedua orangtuaku, terimakasih atas doa restu, kasih sayang, semangat dan material dalam menyelesaikan studi ini. Motivasi, pengorbanan serta kesabaran yang berlimpah pada penulis sejak kecil sampai saat ini dan seterusnya yang tidak akan pernah terbalaskan oleh penulis.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan Tugas Akhir ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 30 Juni 2025
Peneliti,

Rahman Dani
NIM. B1011181088

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

Rahman Dani

Universitas Tanjungpura, Pontianak

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui potensi karakteristik geografis, demografis, dan potensi sumber daya alam yang beragam. Namun demikian, besarnya potensi belum sepenuhnya sejalan dengan capaian indikator ekonomi makro di berbagai wilayah, yang menunjukkan adanya disparitas dan perlunya intervensi kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan faktor krusial dalam menilai kinerja pembangunan wilayah serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Sebagai indikator utama, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta stabilitas sosial (Falahuddin et al., 2024). Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2019 s/d 2023 pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, tampak adanya variasi kinerja yang mencerminkan disparitas pembangunan antardaerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Dalam konteks otonomi daerah Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Menurut Prawiroyudo & Suhendro (2023), menyatakan bahwa sumber pembiayaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja untuk program pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Belanja daerah merupakan instrumen fiskal strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Belanja daerah memiliki korelasi erat dengan peningkatan

kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan layanan publik yang berdampak langsung pada kualitas ekonomi masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk penerimaan dana dari pemerintah pusat yang bersifat terbatas penggunaannya. Namun belanja daerah merupakan representasi dari bentuk pengelolaan fiskal mandiri memiliki signifikansi tersendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimatan Barat. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, ditemukan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh dari DAU, DAK dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu judul pada penelitian ini adalah "pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat".

2. Permasalahan

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui karakteristik geografis, demografis, serta kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, data pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kapasitas fiskal antar Kabupaten/ Kota, yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah serta pemanfaatan instrumen keuangan daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja daerah.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sementara daerah lain seperti Kota Pontianak mengalami pertumbuhan yang lebih rendah meskipun memiliki dana cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kontribusi masing-masing sumber pendanaan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, temuan empiris sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu penelitian ini

dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari DAU DAK, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dianalisis adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang diambil dari 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat selama periode 2019 hingga 2023. Analisis data dilakukan dengan teknik data panel menggunakan program E-Views 10.0, yang mencakup serangkaian uji seperti uji stasioneritas, kointegrasi, uji kolerasi, uji model data, uji regresi linear berganda serta uji hipotesis.

5. Simpulan dan Rekomendasi

5.1. Simpulan

a. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nominal DAU belum secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena penggunaannya cenderung masih terfokus pada belanja rutin, bukan belanja produktif.
b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun DAK meningkat secara nominal dan diarahkan untuk mendanai sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dampaknya terhadap peningkatan PDRB belum terlihat signifikan.

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan dukungan terhadap sektor riil.

5.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah perlu mereformulasi strategi penggunaan DAU agar lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang, khususnya melalui alokasi anggaran yang mendukung infrastruktur produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan sektor unggulan daerah.

b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas perencanaan dalam memanfaatkan DAK, agar proyek-proyek yang dibiayai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan sinergi antara DAK dengan investasi swasta, penguatan kapasitas tenaga kerja, serta adopsi teknologi lokal, agar dana publik ini dapat menciptakan efek pengganda yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memperbesar proporsi belanja produktif seperti belanja modal dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta meminimalkan belanja yang bersifat konsumtif. Efisiensi dan akurasi dalam perencanaan serta pelaksanaan belanja juga harus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan menciptakan nilai tambah ekonomi yang nyata.

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

[1]Rahman Dani

Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of general allocation funds, special allocation funds and regional spending on economic growth in West Kalimantan Province. The type of method used in this study is by using the descriptive-quantitative method. The data amounted to 70, namely from 2019 to 2023 (14 regencies/cities). Furthermore, the methods and analysis tools used are the panel data method, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. Tools for processing data using the eviews software program version 10.0. The results of the data analysis show that 1) general allocation funds have a positive and insignificant effect on economic growth, 2) special allocation funds have a positive and insignificant effect on economic growth, and finally 3) regional spending has a positive and significant effect on economic growth.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure and Economic Growth.

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Adapun data berjumlah 70, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (14 Kabupaten/ Kota). Selanjutnya metode dan alat analisis yang digunakan ialah metode data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi liniear berganda dan pengujian hipotesis. Alat bantu dalam mengelolah data dengan menggunakan program *software eviews* versi 10.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan terakhir 3) belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

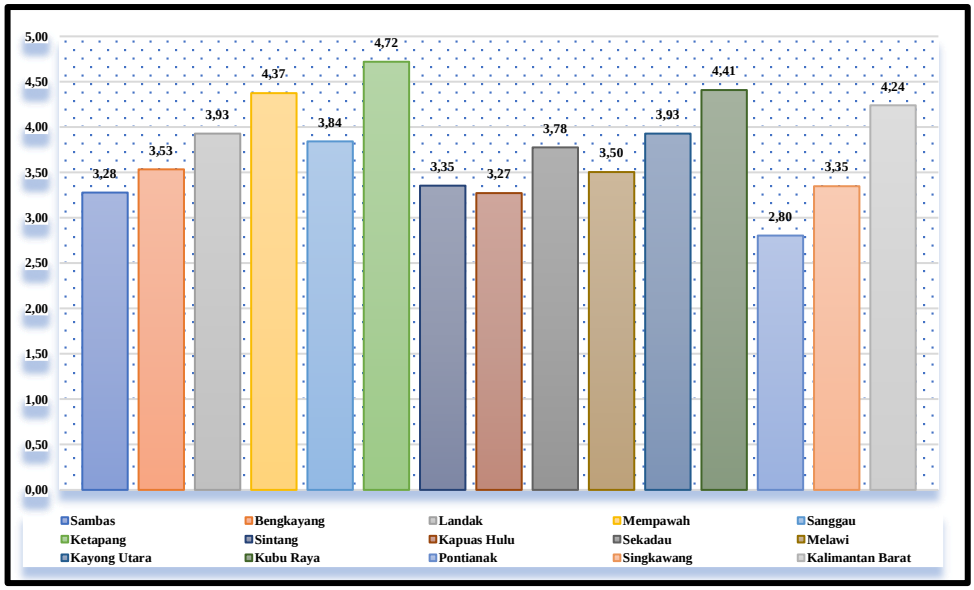
[1]rahman19dani45@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia yang terletak di wilayah barat Pulau Kalimantan, dengan luas wilayah mencapai ± 147.037,04 km². Provinsi ini memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Serawak) di bagian utara serta dilintasi oleh garis khatulistiwa. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kabupaten/ Kota yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui potensi karakteristik geografis, demografis, dan potensi sumber daya alam yang beragam. Namun demikian, besarnya potensi belum sepenuhnya sejalan dengan capaian indikator ekonomi makro di berbagai wilayah, yang menunjukkan adanya disparitas dan perlunya intervensi kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan faktor krusial dalam menilai kinerja pembangunan wilayah serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Sebagai indikator utama, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta stabilitas sosial (Falahuddin et al., 2024). Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2019 s/d 2023 pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, tampak adanya variasi kinerja yang mencerminkan disparitas pembangunan antardaerah.



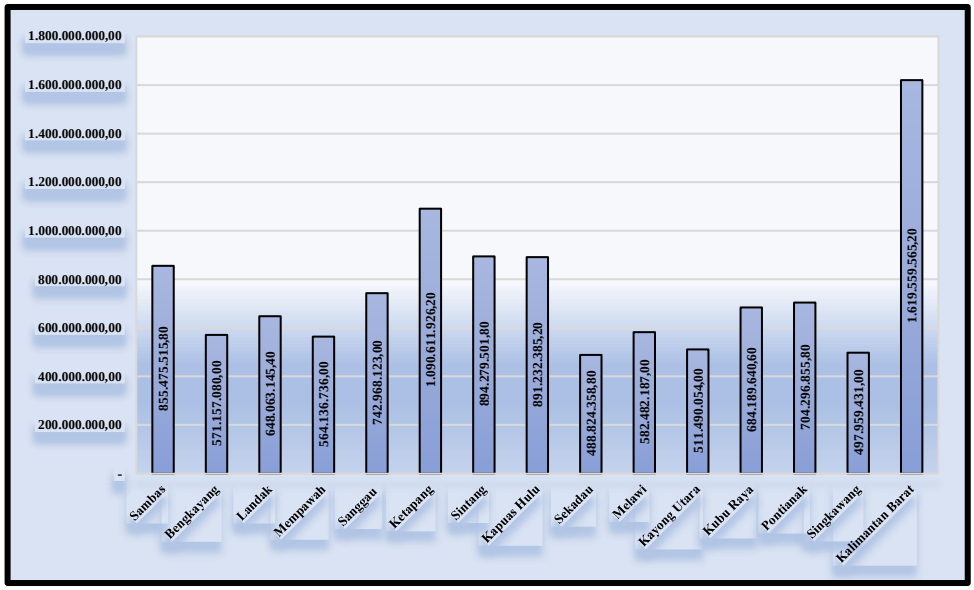
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

GAMBAR 1. RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI PADA 14 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 S/D 2023 (%)

Kabupaten Ketapang mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan rata-rata 4,72%, disusul oleh Kabupaten Kubu Raya (4,41%) dan Kabupaten Mempawah (4,37%). Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal serta pemanfaatan pendapatan daerah yang relatif produktif. Sebaliknya, Kota Pontianak mencatat pertumbuhan terendah sebesar 2,80%, mengindikasikan perlunya penguatan strategi fiskal dan pembangunan ekonomi perkotaan yang lebih adaptif terhadap tantangan pasca pandemi dan urbanisasi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Dalam konteks otonomi daerah Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Menurut Prawiroyudo & Suhendro (2023), menyatakan bahwa sumber pembiayaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja untuk program pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen fiskal utama dalam sistem desentralisasi keuangan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan mendukung penyediaan layanan publik dasar. Alokasi DAU yang memadai dapat memberikan stabilitas keuangan bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal, sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Manulusi et al., 2021). Namun, di sisi lain, menurut Nurrizqi et al., (2023) yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada DAU dapat membatasi efisiensi pengelolaan dana dan menghambat inovasi dalam pemanfaatan sumber pendapatan daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

GAMBAR 2. RATA-RATA DANA ALOKASI UMUM PADA 14 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 S/D 2023 (RP)

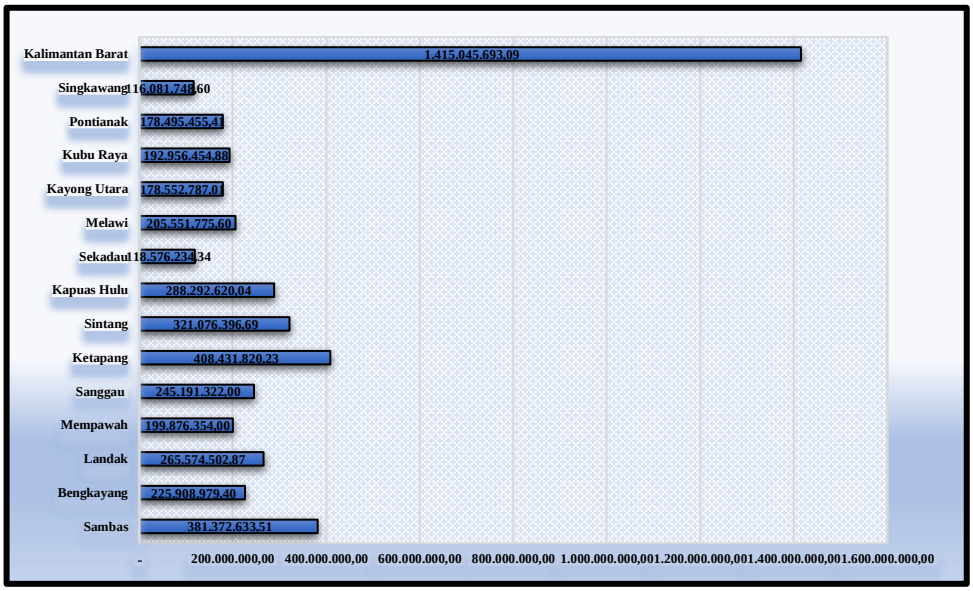
Berdasarkan data rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) periode 2019 s/d 2023 pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, terlihat adanya disparitas alokasi dana antardaerah. Kabupaten Ketapang mencatat DAU tertinggi dengan rata-rata sebesar Rp. 1,09 triliun, disusul oleh Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu masing-masing sebesar Rp. 894,28 miliar dan Rp. 891,23 miliar. Di sisi lain, alokasi DAU terendah diterima oleh Kota Singkawang sebesar Rp. 497,96 miliar, diikuti oleh Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara masing-masing sebesar Rp. 488,82 miliar dan Rp. 511,49 miliar. Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi menerima rata-rata DAU sebesar Rp. 704,29 miliar, yang berada di level menengah dibandingkan daerah lain.

Tingginya alokasi DAU pada kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal di daerah dengan wilayah luas, populasi besar, atau tantangan geografis

yang tinggi. Sementara itu, rendahnya DAU pada daerah perkotaan seperti Kota Singkawang dan kabupaten dengan skala ekonomi kecil menunjukkan penerapan formula DAU yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menandakan perlunya kajian lebih lanjut. Hasil penelitian sebelumnya oleh Rahmah & Zein (2016), menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian serupa oleh Pragiwaksana (2024), menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan tertentu di daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Fungsi utama DAK adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan nasional (Aliyah, 2022). DAK bersumber dari APBN dan penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan tertentu (Abdillah & Ramadhan, 2023). Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga bersumber dari APBN tetapi bersifat umum dan dapat digunakan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan belanja daerah tanpa pengikatan pada program tertentu (Rijal et al., 2023). Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang dan tidak termasuk penyertaan modal (Handayani, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

GAMBAR 3. RATA-RATA DANA ALOKASI KHUSUS PADA 14 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 S/D 2023 (RP)

Analisis data rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) periode 2019 s/d 2023 menunjukkan adanya ketimpangan alokasi antar wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang menempati posisi tertinggi dalam perolehan rata-rata DAK, yaitu sebesar Rp. 408,43 miliar disusul oleh Kabupaten Sambas dengan Rp. 381,37 miliar dan Kabupaten Sintang sebesar Rp. 321,07 miliar. Ketiga daerah ini diduga memiliki kebutuhan pembangunan yang tinggi, baik dari segi infrastruktur dasar, pelayanan publik, maupun luasan wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.

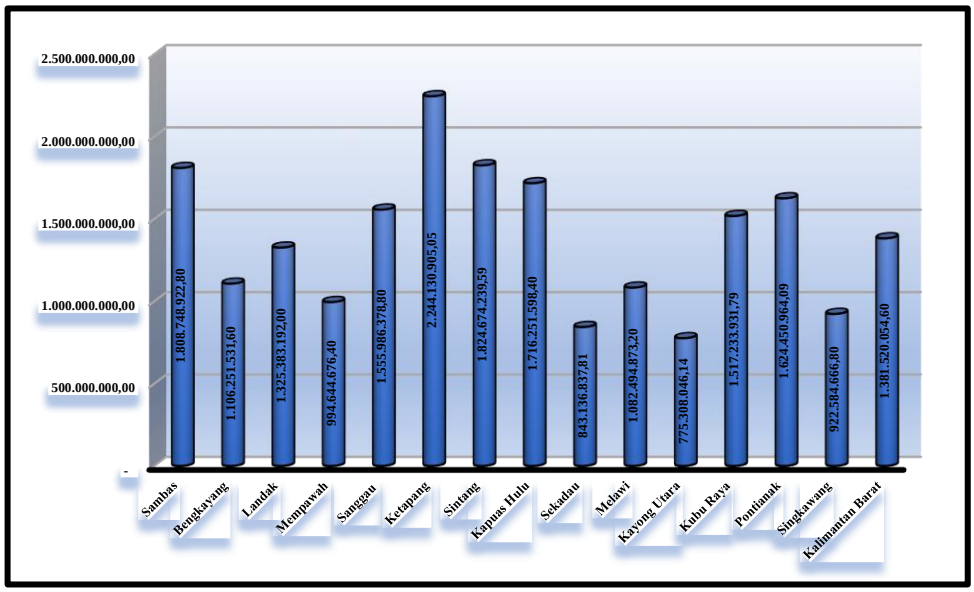
Sebaliknya, alokasi rata-rata DAK terendah tercatat pada Kota Singkawang sebesar Rp. 116,08 miliar, diikuti oleh Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 118,57 miliar, dan Kota Pontianak sebesar Rp. 178,49 miliar. Rendahnya alokasi di kota-kota seperti Kota Singkawang dan Kota Pontianak dapat dikaitkan dengan kapasitas fiskal lokal yang relatif lebih tinggi dan tersedianya pendapatan lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kebutuhan akan DAK menjadi lebih kecil dibandingkan kabupaten yang wilayahnya luas dan infrastrukturnya masih berkembang.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menandakan perlunya kajian lebih lanjut. Hasil penelitian sebelumnya oleh Mokorowu et al, (2020), menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian serupa oleh Rosita & Budhi (2024), menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja daerah merupakan instrumen fiskal strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Belanja daerah memiliki korelasi erat dengan peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan layanan publik yang berdampak langsung pada kualitas ekonomi masyarakat. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk penerimaan dana dari pemerintah pusat yang bersifat terbatas penggunaannya. Namun belanja daerah merupakan representasi dari bentuk pengelolaan fiskal mandiri memiliki signifikansi tersendiri.

Teori Keynesian menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah, dalam bentuk belanja daerah, memiliki peran penting dalam mendorong permintaan agregat, terutama selama periode perlambatan ekonomi. Belanja daerah yang diarahkan pada sektor-sektor produktif berpotensi menciptakan efek *multiplier* yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta membuka lapangan kerja (Mutiatul et al., 2022).

Berdasarkan data rata-rata belanja daerah tahun anggaran 2019 s/d 2023, terdapat variasi antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang tercatat memiliki rata-rata belanja daerah tertinggi sebesar Rp. 2,24 triliun, menunjukkan kapasitas fiskal yang relatif besar dibandingkan daerah lainnya. Selanjutnya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sambas dengan rata-rata masing-masing sebesar Rp. 1,82 triliun dan Rp. 1,80 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen pengeluaran daerah yang lebih besar dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara menunjukkan rata-rata belanja terendah yaitu sebesar Rp. 775,30 miliar, diikuti oleh Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Singkawang dengan masing-masing sebesar Rp. 843,13 miliar dan Rp. 922,58 miliar.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2025

GAMBAR 4. RATA-RATA BELANJA PADA 14 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 S/D 2023 (RP)

Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pembangunan ekonomi lokal. Kota Pontianak, sebagai ibu kota provinsi, memiliki rata-rata belanja sebesar Rp. 1,62 triliun, yang berada di atas rata-rata sebagian besar kabupaten lain. Secara umum, data ini menegaskan pentingnya optimalisasi belanja daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, serta perlunya perencanaan fiskal yang responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Hasil penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan temuan yang beragam. Reksapramudya (2024) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mendukung pandangan Keynesian bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor-sektor produktif.

Namun demikian, temuan berbeda dikemukakan oleh Koyongian et al. (2017) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi dalam efektivitas alokasi belanja, kapasitas kelembagaan, serta perbedaan karakteristik ekonomi antar wilayah, yang menunjukkan bahwa dampak belanja daerah sangat bergantung pada konteks implementasi dan kualitas pengelolaan fiskal di masing-masing daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimatan Barat. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, ditemukan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh dari DAU, DAK dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu judul pada penelitian ini adalah “pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui karakteristik geografis, demografis, serta kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, data pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kapasitas fiskal antar Kabupaten/ Kota, yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah serta pemanfaatan instrumen keuangan daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja daerah.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sementara daerah lain seperti Kota Pontianak mengalami pertumbuhan yang lebih rendah meskipun memiliki dana cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kontribusi masing-masing sumber pendanaan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, temuan empiris sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari DAU DAK, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi pada di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi pada di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun kontribusi yang diharapakan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi teoritis
   a. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan terkait pengaruh DAU, DAK dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
   b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam kajian pada bidang dan masalah yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

2. Kontribusi praktis
   a. Hasil penelitian dan analisis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerahnya masing-masing.
   b. Hasil penelitian dan analisis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah lainnya agar dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat melalui upaya peningkatan DAU, DAK dan belanja daerah.